

**PERILAKU POLITIK SANTRI DALAM PILKADA DI KAB. KLATEN
TAHUN 2005 DI PONPES AL MUTAQIEN**



SKRIPSI

**DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH

FAJAR TRI AWAN
NIM : 03370291

PEMBIMBING :

- 1. DR. AHMAD YANI ANSHORI**
- 2. Drs. AHMAD PATIROY, M. Ag.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PERILAKU POLITIK SANTRI DALAM PILKADA
DI KAB. KLATEN TAHUN 2005
DI PONPES AL-MUTAQIEN

Yang disusun oleh :

FAJAR TRI AWAN
NIM. 03370291

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007 M / 23 Dzulhijjah 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Desember 2007.

Dekan Fakultas Syari'ah



Drs. Yudian Wahyudi, MA. Phd

NIP. 150 240 524

Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP.150 289 435

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.
NIP.150 300 639

Pembimbing I

Dr. Ahmad Yani Anshori.
NIP.150 276 308

Pembimbing II

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP.150 256 648

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP.150 276 308

Penguji II

Drs. H. Abdul Majid AS.
NIP.150 216 531

ABSTRAK

Lahirnya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kiranya telah mengakomodasi aspirasi rakyat, dengan di berlakukannya Undang –undang tersebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat di selenggarakan secara langsung sesuai dengan pasal 24 ayat 5, tentang tata cara pelaksanaan Pilkada, calon langsung di pilih oleh masyarakat, santri sebagai komunitas masyarakat yang mempunyai hak yang sama di berikan kebebasan untuk menentukan pilihanya, di samping itu santri mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya menjalankan kesadarn dan pembangunan dalam bidang politik. Pilkada di Kabupaten Klaten di selenggarakan pertama kali pada tanggal 26 september 2005. Pemilihan Pondok Pesantren Al Mutaqien sebagai lokasi penelitian, karena pondok pesantren Al Mutaqien adalah Ponpes terbesar yang berada di Kabupaten Klaten dengan jumlah santri terbanyak, di samping itu di Pondok tersebut terdapat seorang Kiai yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat baik di pesantren maupun di luar pesantren.

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Sedangkan analisis yang di gunakan adalah analisis kualitatif. lokasi penelitian ini adalah di Pondok pesantren Al Mutaqien yang berada di Kabupaten Klaten. Data di ambil dengan cara obserfasi, penyebaran kuisisioner, dan wawancara. Populasi ini adalah sebagian santri yang mempunyai hak suara di pondok pesantren Al Mutaqien dengan jumlah 60 santri, dari 600 santri yang belajar di pondok tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada secara langsung yang pertama kali di adakan di Kabupaten Klaten tahun 2005 berjalan dengan lancar. dan sesuai dengan mekanisme tata cara Islam yang menekankan prinsip Musyawarah, ijma kesepakatan bersama dalam proses Pemilihan seorang pemimpin.

Perilaku santri di Ponpes Al Mutaqien dalam mengikuti perkembangan pasangan calon sangat jarang di karenakan kesibukan para santri dalam mengikuti program pondok pesantren dan belajar di madrasah. Kampanye pasangan calon berjalan sebagaimana mestinya dan kebanyakan santri memilih mengikuti kampanye yang di lakukan secara terbuka dengan alasan mereka menganggap kampanye ini adalah ajang pesta rakyat sehingga mereka bebas mengeluarkan segala ekspresinya dengan berpawai di kota – kota, di samping itu kampanye yang di lakukan secara terbuka dapat langsung mendengarkan program kerja dari masing – masing calon. Secara umum, sikap atau perilaku santri berkaitan dengan dukungan pada pasangan calon Kepala Daerah di wujudkan dengan sikap biasa- biasa saja atau netral. Kiai atau pengasuh sebagai pemimpin tertinggi di pondok pesantren Al Mutaqien juga memperlihatkan sikap netral tidak mendukung calon tertentu, dan memberikan saran kepada seluruh santrinya untuk menentukan pilihanya sesuai dengan pilihan masing – masing, tradisi dan sikap yang demikian kiranya juga dapat mempengaruhi Perilaku politik santri dalam menentukan sikap, yang berdampak pada tidak mendukung calon – calon tertentu. santri dalam mengikuti tata cara sosialisasi dalam pelaksanaan Pilkada di peroleh dari selebaran – selebaran yang di tempel di tempat – tempat umum, dan selebaran tersebut biasanya di tempelkan atau di sebarkan oleh para tim sukses, sehingga peristiwa tersebut di jadikan ajang untuk mencari dukungan. Perlu di ketahui bahwa dalam penyelenggaran Pilkada tersebut khususnya Di Ponpes Al Mutaqien menghadapi banyak permasalahan seperti terbatasnya sarana dan prasarana penunjang akses informasi karena kurang optimalnya kinerja KPUD.

Kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah Perilaku politik santri dalam pemilihan Kepala Daerah di Kab Klaten Tahun 2005 berkaitan dengan mengikuti perkembangan pasangan calon, kampanye, pemberian dukungan, sosialisasi, sampai penggunaan hak pilih berjalan dengan baik, walaupun ada kekecewaan dari pihak santri di karenakan tidak adanya warga NU yang maju mewakili mereka. Kiai sebagai pemimpin tertinggi di Ponpes Al Mutaqien ternyata juga tidak mendukung calon – calon tertentu sehingga sikap tersebut cenderung di ikuti oleh para santri dengan memperlihatkan sikap netral.

MOTTO

اقرا باسم ربك الذي خلق

“ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan “



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**“ Sebuah Karya kecil yang jauh dari kesempurnaan ini aku persembahkan kepada
Ayahanda Zubaidi BA, Ibuku tercinta Sumiyatun
Kakaku Hafid, Udin, Mbak Dwi yang Telah memberi motifasi, dan Dukungan
Keluarga Besar Mbah Mitro S. Dan Mbah Arjo Suwiryo.”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Maha Suci Allāh yang dengan ijin dan ridonya segala sesuatu menjadi ada. Keagungan cinta-Nya mengalahkan kedurhakaan dan kemunafikan makhluk. Keberjumpaan dengan-Nya merupakan tujuan akhir dan puncak dari proses pencarian panjang dan melelahkan sebagian makhluk yang arif dalam melihat makna kehidupan. Bukan merindukan nikmat-Nya surga beserta isinya, seperti mendapatkan dunia dan fatamorgananya, melainkan agar senantiasa berada dalam kehangatan pelukan sang Pencipta dan Pemilik segala keindahan dan kenikmatan dalam rentang waktu yang tak pernah henti.

Penyusun panjatkan shalawat dan salam kepada yang tercinta, Muhammad SAW yang budi pekertinya akan selalu terwariskan kepada para kekasih Allāh, dan kepada mereka penyusun haturkan salam.

Segala sesuatu yang sedang berjalan sebagai sebuah proses untuk terus menerus belajar dan berbenah agar lebih baik. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada beberapa pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik kami, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. H.M Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA. P. hd
3. Pembimbing I dan II, DR. Ahmad Yani Anshori dan Drs. Ahmad Patiroy, M. Ag yang selalu membimbing kami untuk terselesaikannya skripsi ini.

4. Kepada Penasehat Akademik, Drs.Makhrus Munajat, M.Hum yang selalu berkenan untuk dimintai keterangan dan memberikan masukan dan nasihat bagi penyusun semoga amal kebaikan diterima oleh Allāh SWT
5. Kepada Ayahanda Zubaidi, BA, Ibuku tercinta Sumiyatun, terima kasih atas perhatian, bantuan materi dan morilnya yang diberikan selama ini.
6. Teman-teman kelas jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2003, temen organisasi, KMSK, PMII, BEMJ, JS II yang telah memberikan dorongan dan kritikan yang konstruktif dalam pembuatan skripsi ini.
7. Teman karib, Ibin, Darwin, Tio dan Kusuma wardani ku yang selalu memberikan dorongan moril dan juga tidak lupa teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa ketajaman analisis masih perlu diasah, demikian pula dalam pola pengungkapan harus terus dipelajari dari para penulis lainnya yang jauh lebih berpengalaman sehingga niat untuk mengkaji lebih dalam lagi tidak akan menjadi niat yang sia-sia. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Dulhijjah1428 H
8 Januari 2008 M

Penyusun

Fajar Tri Awan
NIM. 03370291

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوانى	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
	أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
	لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

	القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
	أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BABII PANDANGAN ISLAM TERHADAP PEMILIHAN SEORANG PEMIMPIN DAN DINAMIKA POLITIK SANTRI	
A.Pandangan Islam Terhadap Seorang Pemimipin	21
B.Pengertian Pemilihan Kepala Daerah	22
C.Konsep Tradisi Politik Santri.....	24
D.Perkembangan Politik Santri	32

**BABIII PERILAKU POLITIK SANTRI AL MUTAQIEN DALAM
PILKADA DI KAB KLATEN TAHUN 2005**

A. Sejarah Berdirinya Ponpes Al Mutaqien	52
B. Keadaan Santri	54
C. Respon politik Santri dalam Pilakada	55
D. Isu isu Calon Yang Berkembang Dalam Pilakada	57
E. Perilaku Poltik santri Al Mutaqien Dalam Pilakada Kab Klaten Tahun 2005	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan al-Qur'an dan Hadis.....	I
B. Biogarafi Ulama' Dan Sarjana.....	II
C. Daftar Kuisisioner dan Wawancara	III
D. Surat Izin Riset	VI
E. Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan keniscayaan yang dilatar belakangi oleh berbagai perkembangan terbaru sebagai pengganti Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 telah mengakomodasi aspirasi rakyat yang menghendaki lebih terjaminnya pelaksanaan Demokrasi di Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang diperbaharui dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 bahwasanya Pemerintahan daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian Otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, Daerah di harapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

¹ Daniel S. Salosa, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata cara Pilkada Langsung Menurut Undang – Undang No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta, Media Presindo 2005), hlm. 7.

Dalam fase Demokrasi menyusul tumbangya rezim otoriter, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*Pilkada*) secara langsung merupakan babak agenda yang sangat penting dan menentukan arah demokrasi yang dicita-citakan, di mana seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Pilkada menjadi semacam simpang jalan, Apakah Proses politik itu terus setia pada jalur Demokratisasi atau berbelok jalan atau bahkan berbalik arah? Segala sesuatu hampir ditentukan pada simpangan jalan tersebut.

Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintahan karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Meskipun pada umumnya pengertian Demokrasi itu dapat dikatakan tidak mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat dalam posisi yang amat penting, namun pelaksanaannya dalam lembaga kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh berbagai rute yang tidak selalu sama. Indonesia sebagai salah satu negara yang juga lahir dari pengalaman kolonialisme sesudah perang Dunia ke II telah menjadikan Demokrasi sebagai salah satu prinsip ketatanegaranya. Telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap konstitusi atau penukaran rezim dan pemimpin nasional tapi tidak pernah mengeser prinsip Demokrasi ini, bahkan tema penting yang selalu di kampanyekan adalah ‘ Menegakkan Kehidupan Demokrasi’ Yang di yakini sebagai hak politik yang

amat penting bagi rakyat.² Demokrasi dapat di anggap sebagai cara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila, yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah suatu pola Pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, dan dari mereka yang di perintah. Pemerintahan adalah hasil dari aspirasi dan kemauan rakyat. Seperti yang tercantum dalam batang tubuh Undang-undang dasar 1945 sebagai berikut :

Demokrasi adalah Pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta memelihara persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.³

Seiring di berlakukannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 5, Tentang yang di tunjuk menjadi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah. Jadi Rakyat langsung memilih figur yang mereka anggap layak untuk menduduki jabatan dalam menjalankan Pemerintahan di Daerah.

Dalam konstalasi sistem sosial, dan politik umat Islam khususnya kaum santri adalah merupakan salah satu aset bangsa yang mempunyai hak sama sebagai warga negara. Dilihat dari partisipasi politik peran umat Islam khususnya kaum santri lebih cenderung partisipatif. partisipasi yang di lakukan santri

² Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. (Jakarta, Rienika Cipta 2000), hlm. 3.

³ Undang – Undang Dasar 1945, P-4, GBHN, *Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan.), hlm. 288.

merupakan wujud dari perilaku nyata dari sikap politik yang dimilikinya, Sikap politik seseorang diperoleh dari proses sosialisasi politik yang di alaminya Sebagai seorang santri tentu saja peranan kepemimpinan Kiai dalam membentuk sikap politikya sangat besar di samping itu juga adanya ketundukan santri kepada Kiai yang merupakan tradisi pesantren yang mau tidak mau akan berpengaruh juga terhadap sikap politik santri. hal ini di kuatkan dengan pandangan Clifford Geertz yang mengatakan bahwa ada tiga klasifikasi kekuatan masyarakat jawa yakni Abangan, Santri, Priyayi, yang masing masing mempunyai peran penting berkaitan dengan akses sosial politik dan ekonomi⁴. tetapi dengan meningkatnya tingkat kedewasaan berpolitik yang dipengaruhi oleh kemajuan zaman dan perkembangan pola pikir pemahaman santri mengakibatkan kepemimpinan Kiai bukanlah satu – satunya faktor yang menentukan sikap politik santri.

Keberadaan pesantren yang sangat banyak sedikitnya terdapat 4.174 pesantren yang tersebar di pelosok Nusantara. hampir disetiap propinsi mempunyai pondok pesantren yang dihuni oleh berbagai macam santri. Jutaan santri belajar mengaji di berbagi pondok pesantren. Jumlah santri yang sangat besar yang di miliki oleh pesantren menjadikan pesantren beserta santri dan Kiainya mempunyai kekuatan politik yang sangat kuat dan menjadikan incaran berbagai macam Partai politik untuk mendapatkan dukungan massa pesantren..⁵

Peran santri dalam perjuangan fisik dan motifasi politik dalam skala nasional tergambar dalam perjuangannya dalam mengusir penjajah dan

⁴ Khoiru Ummatin, *Perilaku Poiltik Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002), hlm. 12.

⁵ Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 123 – 124.

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia baik secara fisik maupun diplomasi. Sikap anti komunis yang ditunjukkan oleh kaum santri secara cultural dan politis mencapai puncaknya setelah PKI melakukan Kudeta berdarah G 30 S/ PKI atau di kenal dengan gerakan 30 september Tahun 1965 yang telah menelan banyak korban yang sangat banyak dengan pembunuhan secara sadis terhadap para jenderal. kaum santrilah yang diwakili oleh Partai Nahdlatul Ulama sangat mengutuk tindakan biadab PKI tersebut dengan pernyataan yang isinya: *Pertama Mengutuk dan mencela Perbuatan kontra revolusi* dari apa yang dinamakan G 30 S PKI.⁶

Mulai tahun tersebut banyak Organisasi kemasyarakatan dan kelompok Islam baik yang modernis atau tradisional maupun fundamentalis berebut dan bertarung untuk memperoleh dukungan guna memperjuangkan kepentingan umat Islam khususnya dan kepentingan bangsa pada umumnya.

Pada dasarnya, kelompok Islam khususnya kaum santri mendapatkan kepercayaan dan pengakuan yang besar dari rakyat Indonesia. Partai – partai yang didirikan oleh umat Islam mendapatkan suara yang sangat signifikan dan dapat menyaingi partai – partai nasional. Kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat Indonesia terhadap partai Islam ternyata tidak dilaksanakan dengan baik oleh politisi Islam. Politisi Islam hanya mempolitisir santri untuk mendapatkan kekuasaan, budaya patronase yang sudah mengakar di dunia pesantren menjadikan para politisi dengan mudah dapat meraup massa sebanyak – banyaknya dari kaum santri dengan mendekati kiayinya. Akan tetapi suara santri yang setiap pemilu

⁶ Staf Pertahanan Keamanan. *40 Hari Kegagalan G. 30. S 1 Oktober – 10 Nofember 1965*, (Jakarta : Lembaga Sejarah 1966), hlm. 72.

mendukung politisi ternyata tidak membuat politisi peduli dengan nasib kaum santri yang selama ini tidak pernah mendapatkan kehidupan yang layak.

Berkecimpungnya para Kiai dan para politisi Islam dalam dunia politik praktis ternyata tidak menjadikan umat Islam semakin maju dan sejahtera serta tidak dapat memperjuangkan politik Islam khususnya kaum santri hanya di jadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan.⁷

Kecenderungan dalam politik santri terhadap ide Kenegaraan yang banyak menjadi dasar pertimbangan (*pertimbangan*) Pemerintah. Hal ini tampak ketika kaum Santri sepakat untuk menempatkan politik sebagai salah satu instrument perjuangan, yang didasari oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan yang melingkupinya, budaya politik yang berkembang, serta orientasi pemikiran kaum santri itu sendiri. Peran santri dalam bidang politik ini sebenarnya termotifasi oleh satu tujuan, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an : surat At-Taubah (9) : 122. dan surat An -Nisa (4) : 58.

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون⁸
 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا⁹

⁷ Dr. Endang Turmudzi, *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm 246 - 247

⁸ *At- Taubah* (9) : 122

⁹ *An Nisa* (4) : 58

Dari ayat inilah, maka kaum santri berupaya menjadikan politik sebagai jalan berdakwah dan membangun masyarakat. khususnya bidang politik, dakwah dan sosial. peran santri melalui pembahasan perilaku politik santri dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Kabupaten Klaten tahun 2005 yang penulis maksudkan melalui studi kasus ini, dianggap sangatlah menarik untuk diulas. Keberadaan pondok - pondok pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten membuat perhatian khusus pada penulis untuk lebih jauh menilik seberapa besar peran santri khususnya pondok pesantren Al Mutaqien Pancasila sakti. karena Penulis mengagangap pondok pesantren ini memiliki daya tarik tersendiri dan di anggap Istemewa di bandingkan dengan pesantren lain yang ada di Klaten. Karena pondok pesantren tersebut memiliki jumlah santri yang banyak, kurang lebih 600 santri yang belajar di ponpes tersebut, pondok pesantren yang terbesar di Kab Klaten. Di samping itu pondok pesantren Al Mutaqien Pancasila Sakti juga memiliki sosok figur seorang Kyai yang kharismatik yaitu Mbah Liem, yang banyak di kenal oleh para pejabat, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Ada beberapa pondok pesantren di Kab Klaten yang jumlahnya sangat berpengaruh terhadap proses pemilihan Kepala Daerah. secara kuantitas jumlah santri yang ada memiliki suara yang cukup berpengaruh dan signifikan. Tidak hanya suara dan aspirasinya saja yang dipakai akan tetapi kecenderungan pola perilaku politik santri yang menjadi perhatian khusus. Pola perilaku politik santri yang murni yang terbentuk dari sikap partisipatif dan kehidupan keseharian santri, Disini tidak hanya penulis yang memandang istimewa pengaruh perilaku

politik santri, Akan tetapi ada beberapa pihak- pihak yang memiliki kepentingan didalamnya pula yang menganggap santri memiliki kekuatan dan pengaruh. Para Pihak- pihak tersebut adalah Partai- partai politik yang terlibat dalam proses Pilkada, partai – partai politik yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari golongan kaum santri.

Penggantian Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Menjadi Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah membawa harapan baru bagi Demokratisasi tingkat lokal. Ruang Demokrasi makin terbuka lebar, karena warga masyarakat termasuk santri dapat terlibat langsung dalam Pemilihan Kepala Daerah. Namun dibalik harapan tersebut ada sejumlah persoalan substansial yang membuat agenda demokratisasi menjadi terhambat, karena para calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah masih harus mengajukan pencalonannya melalui partai politik. Dengan kata lain, Pilkada kali ini masih diwarnai praktik oligarki politik. Kekuasaan bukan di tangan rakyat melainkan di elit – elit politik

Partai politik peserta ajang pesta demokrasi (*pemilu*) dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada adalah perwujudan partisipasi rakyat melalui penggunaan hak suaranya untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memimpin dan melaksanakan pemerintahan Daerah. Dimana dalam pelaksanaannya, pasangan calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pilkada merupakan pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD, atau dukungan suara dalam pemilu legislative dalam jumlah tertentu.

Dalam pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan secara langsung ini, partai politik harus mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Di samping itu, partai politik sebagai wadah pendidikan politik, komunikasi politik dan sosialisasi politik masyarakat menuju proses kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.

Masyarakat dalam hal ini santri adalah suatu komunitas yang merupakan bagian yang sangat vital karena jumlah suara mereka cukup banyak dan bisa dijadikan alat atau kendaraan partai – partai politik untuk dapat mensukseskan dan mendukung pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah. Karena sukses dan tidaknya dalam Pemilihan Kepala Daerah ditunjukkan dengan tingkat partisipasi, dengan memberikan suara mereka, dalam hal ini masyarakat dan lebih khususnya kaum santri

Dari uraian diatas maka penulis ingin mencoba mengkaji lebih dalam lagi dalam sebuah riset penelitian mengenai sikap, perilaku santri dalam Proses Pilkada di Kabupaten Klaten Th 2005 di Pondok Pesantren Al Mutaqien Pancasila Sakti.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Perilaku Politik Santri Di Ponpes Al Mutaqien Pancasila Sakti dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Klaten Tahun 2005.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui bagaimana Perilaku politik Santri pondok pesantren Al Mutaqien Pancasila Sakti dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Klaten pada tahun 2005.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai sumbangan bagi kelengkapan data dalam upaya pengkajian selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku politik santri.
- b. Untuk menambah khasanah keilmuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka.

Dari beberapa literatur yang kami pelajari, memang banyak buku majalah maupun tulisan – tulisan yang mengupas tentang pesantren, Kyai dan santri. Akan tetapi dari data tersebut hanya sebatas peran pesantren, Kiai dan santri dalam dataran bidang social, politik dan kemasyarakatan. didalam buku *Tradisi Pesantren* Karya Zamakhsari Dofier, yang menjelaskan bagaimana peran Kiai yang sangat dominan dalam sebuah pesantren baik terhadap santri maupun masyarakat. Di dalam buku tersebut juga diungkapkan bahwa selain para Kiai mempunyai pengaruh dan otoritas yang penuh dalam masalah politik terhadap para santrinya dan terhadap masyarakat sekitarnya, akan tetapi dalam buku

tersebut belum mengeksplorasi tentang bagaimana perilaku politik Kiai tersebut dalam mempengaruhi politik para santrinya dan belum menyentuh permasalahan perilaku politik santri¹⁰.

Di dalam bukunya Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, strategi kebudayaan dalam Islam*. yang menjelaskan tentang perkembangan santri dalam berpolitik, dan bernegara. Disamping itu buku tersebut juga, menggambarkan dan menguraikan tentang perilaku santri dalam konstalasi perpolitikan di Indonesia¹¹

E. Kerangka teoritik

Perilaku Merupakan dalam sikap, yaitu komponen konasi yang merupakan kesiapan atau kecenderungan bagi suatu jenis aksi tertentu yang berhubungan dengan obyek sikap.¹² Maka perilaku erat sekali hubunganya dengan sikap.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Sebagaimana di kutip dalam Bukunya M. Quraish Shihab¹³ Kata Politik Sebagai Segala urusan dan tindakan (kebijakan,

¹⁰ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta

Lp3es 1994)

¹¹ Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri Strategi Kebudayaan Dalam Islam*, (Yogyakarta : Sipes, 1994)

¹² Jack Duncan, *Organization Behafur*, (Hougton milfin Company, Boston 1981), hlm. 92.

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran* (Mizan, Bandung, 1996), hlm. 416.

siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain. Juga dapat artikan sebagai kebijakan, cara bertindak dalam menangani atau menghadapi suatu masalah.

Dalam kamus – kamus bahasa arab modern, kata politik biasanya di terjemahkan dengan kata *siyasah*. kat ini terambil dari akar kata *sasa-yasusu* yang biasa di artikan mengemudi, mengendalikan, mengatur dan sebagainya. Dari akar yang sama ditentukan kata *sus* yang berarti penuh kuman, penuh kutu atau rusak.

Uraian Al- Quran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat – ayat hukum. Kata ini pada mulanya berarti menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali, dalam Al Quran ditemukan dua puluh kali kata hikmah, salah satu diantaranya adalah surat Al- Baqarah (2): 269:

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر
إلا أولو الألباب¹⁴

269. Allah menganugerahkan Al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang banyak. dan Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).

¹⁴ Al Baqarah (2): 269.

Menurut tinjauan hukum Islam ada dua jenis politik yaitu politik kualitas tinggi dan politik kelas rendah. Politik kualitas tinggi adalah politik yang di dasari dengan rasa tanggung jawab (*mas uliyah, accountability*) baik tanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat tapi juga pertanggungjawaban besok kepada Allah. setiap jabatan politik pada hakikatnya adalah amanah dari masyarakat yang harus di pelihara sebaik baiknya. Politik kelas rendah adalah politik yang tidak sehat penuh kelicikan kekuasaan sebagai amanah dan nikmat Tuhan tidak dipergunakan sebaik- baiknya¹⁵

Menurut Robert K. Carr, bahwa perilaku politik (*political behavior*) sebagai suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik tertentu situasi politik yang di maksud sifatnya sangat luas cakupannya.¹⁶ Yaitu antara lain sebagai pengertian respon emitional berupa dukungan atau empati kepada Pemerintah, respon terhadap Undang – Undang dan respon terhadap obyek struktur politik lainnya.

Jadi dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku politik merupakan aktifitas atau tindakan yang di lakukan oleh indifidu atau kelompok untuk merespon obyek tertentu.

Dari beberapa cakupan perilaku di atas, maka perilaku politik dapat di bagi menjadi dua. Pertama, perilaku politik lembaga–lembaga dan para pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan

¹⁵ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam, Antara Cita Dan Fakta*,(Bandung: Mizan, 1987), hlm 30-31.

¹⁶ Di ambil dari Skripsi, *Perilaku Poltik santri Di Ponpes Raudlatut Thalibin*, Secang, Magelang Tahun 2006 hlm 12.

keputusan politik. Kedua, perilaku politik warga biasa baik individu, maupun kolektif di mana mereka tidak berwenang seperti yang pertama dalam melaksanakan fungsinya, karena apa yang dilakukan oleh pihak yang pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan pihak kedua ini disebut sebagai *political participation*.¹⁷

Partisipasi dari politik itu sendiri adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum didalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Mengenai bentuk partisipasi politik mempunyai dua bentuk pertama, partisipasi politik konvensional yaitu partisipasi politik yang dilaksanakan secara normal dalam suatu sistem politik tertentu, misalnya memberikan suara, merespon calon presiden, calon gubernur, calon bupati dan mengikuti sosialisasi dari KPU mengenai mekanisme pencoblosan. sedangkan yang kedua partisipasi politik yang non konvensional adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh warga dengan cara – cara di luar mekanisme dan kebiasaan didalam sistem politik secara tidak teratur, misalnya demonstrasi, konfrontasi dan sebagainya.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perilaku politik merupakan aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap obyek tertentu. Sedangkan perilaku politik di artikan sebagai fungsi dari kondisi sosial, ekonomi, dan fungsi kepentingan, maka Perilaku politik diantaranya adalah Produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat, atau golongan dalam masyarakat tersebut. sehingga dapat

¹⁷ Nurcholis Madjid, *Bilik Bilik pesantren : Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm 53 – 54.

disimpulkan juga bahwa Perilaku Politik Merupakan Tanggapan, Persepsi, Sikap Dan keyakinan serta sebagai suatu pendekatan pada Ilmu politik dimana Pelaku politik yang di maksud disini adalah Perilaku politik santri Dalam Pilkada di Kab Klaten Tahun 2005.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang obyeknya peristiwa faktual yang ada di lapangan dalam hal ini penelitian difokuskan di Pondok Pesantren Al Mutaqien Yang berada di Dusun Sumberjo, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan penulis untuk mengungkapkan bagaimana perilaku politik santri pada pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tahun 2005 di Kabupataen Klaten. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah Deskriptif, karena dalam penelitian ini berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau menjelaskan keadaan berdasarkan kenyataan yang ada.

Metode Deskriptif menurut Natsir Dimaksudkan untuk membuat gambaran atau lukisan secara systematic, factual dan akurat mengenai fakta – fakta sifat, serta hubungan – hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁸ Sedangkan penelitian deskreptif yaitu suatu penelitian yang terbatas mengungkapkan fakta(

¹⁸ Moh Natsir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indah, 1983), hlm. 67.

fact finding). Hasil penelitian di tekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Pondok Pesantren Al Mutaqien Pancasila Sakti yang berada di desa Sumberjo, Kelurahan Troso, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari unit yang dianalisis yang ciri – cirinya diduga atau skala individu yang ada di daerah peneliti. Adapun populasi yang akan kami gunakan adalah santri yang sudah mempunyai hak suara dalam Proses Pilkada Di Kab Klaten Th 2005 yang berjumlah 60 santri baik yang menetap atau santri atau tidak menetap, termasuk juga santri kampung yang belajar dan berpartisipasi dalam Pilkada.

b. Sampel

Sample adalah sebagian individu dari populasi yang diselidiki atau kata lain sampel bagian dari jumlah keseluruhan populasi. Dalam pengambilan sampel penyusun menggunakan teknik purposif sample yakni dengan cara menentukan responden yang diwawancarai dan di beri kuesioner atau pertanyaan – pertanyaan sehubungan dengan suatu masalah yang akan di teliti.¹⁹ Adapun santri yang mengisi daftar kuisisioner dan yang kami wawancarai adalah 60 santri termasuk Pengasuh Ponpes Al Mutaqien,

¹⁹ Sanapiah faisal, *Format – format Penelitian Sosial* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2003), hlm.67.

dan tentunya santri yang sudah mempunyai hak suara dan tentunya juga secara langsung berpartisipasi dalam Pilkada

4. Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam skripsi ini, terdiri atas dua kategori, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan penelitian di Pondok Pesantren Al Mutaqien Pancasila Sakti yang berada di Kab Klaten.
- b. Data sekunder, yaitu karya – karya yang relevan dengan studi ini, yang mencakup buku – buku, jurnal, ensklopedia maupun artikel – artikel dari media massa, yang berhubungan dengan persoalan yang di teliti.

Guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini maka cara yang di tempuh dengan metode, sebagai berikut :

- a. Metode Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena – fenomena yang diselidiki dan dapat pula berarti memperhatikan dengan cermat atau pengumpulan bahan dengan jelas dari gejala – gejala yang di hadapi lalu mencatatnya.²⁰ Metode ini di gunakan untuk mengamati perilaku Perilaku Santri Di pondok Pesantren Al Mutaqien Pancasila Sakti Yaitu melalui kegiatan – kegiatan yang di lakukan Para Santri, Khususnya bidang politik.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 192.

b. Metode Wawancara (*interview*), yakni Wawancara bebas dan terpimpin guna mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian.²¹ Dalam hal ini, sebagai Subyek penelitian adalah para santri dan Kiai, serta para pihak yang sekiranya dapat memberikan input data yang signifikan. upaya ini di tempuh guna mendapatkan data primer dengan nilai validitas yang tinggi.

c Metode Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang di lakukan dengan mencatat peristiwa – peristiwa yang berlalu, data tersebut bisa berwujud Buku – buku, jurnal, karya – karya monumental seseorang, foto, gambar, yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.²²

d. Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan, di mana pelaksanaanya dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan mengenai masalah yang akan di teliti dan daftar pertanyaan ini akan di berikan kepada subyek yang akan di teliti, dalam hal ini santri.

6. Metode analisis data

Analisis data adalah rangkain kegiatan penelahan, pengelompokan, sistematis penafsiran, verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.²³ Analisis data yang penyusun lakukan adalah cara berfikir Induktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta – fakta khusus, peristiwa – peristiwa konkrit, kemudian dari fakta – fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Khusus bab *IV* (empat) penyusun akan menggunakan cara

²¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Surfey* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 198.

²² Prof. Dr. Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,), hlm. 82.

²³ Imam Suprayogo Dan Tabrani, *Metedologi Peneltian Sosial Agama* (Bandung : Rosda, 2001), hlm. 191.

berfikir secara deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta – fakta yang bersifat umum kemudian ditarik ke dalam kesimpulan yang umum.

Proses analisis data dilakukan dengan Mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasikan dengan metode – metode diatas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai. Oleh karena itu, data yang diperoleh akan disusun secara deduksi dan induksi secara bergantian, guna merekonstruksikan pendapat para santri. selanjutnya ditempuh pola reflektifitas dalam penyimpulanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab. adapun struktur uraiannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama adalah Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metedologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang pandangan Islam terhadap seorang pemimpin, dan Dinamika Politik santri pada bab ini juga akan diuraikan mengenai Politik santri dalam konstalasi perpoltikan di Indonesia.

Bab ketiga, merupakan sejarah berdirinya Pondok Pesantren, keadaan, respon santri terhadap Pilkada dan pada bab ini juga akan di uraikan mengenai isi dari skripsi yang menguraikan tentang sikap, dan perilaku politik santri di Ponpes Al Mutaqien dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kab. Klaten pada Tahun 2005 yang lalu.

Terakhir, *Bab keempat*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran – saran beserta lampiran–lampiran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana telah penyusun kemukakan dan uraikan pada bab sebelumnya juga dengan deskripsi dan analisis terhadap data yang telah penyusun lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa perilaku politik santri dalam Pilkada di Kab Klaten Tahun 2005 di Pondok pesantren Al Mutaqien sebagai berikut :

1. Santri cenderung lebih jarang mengikuti perkembangan pasangan calon dalam pilkada, dan sebagian santri juga menjawab pernah mengikuti perkembangan calon Kepala Daerah dengan intensitas 1 kali dalam satu minggu, Hal ini di sebabkan karena mereka hanya di sibukan dengan kegiatan – kegiatan di madrasah dan di Pondok Pesantren. Kebanyakan media yang di gunakan untuk mengetahui perkembangan pasangan calon adalah melalui selebaran – selebaran yang di sebarkan atau di tempel oleh tim sukses di segala tempat.
2. Dalam pilkada yang diselenggarakan secara langsung ini santri di ponpes Al Mutaqien cenderung mempunyai rasa ingin tahu keingintahuan dan penasaran mereka disebabkan karena calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di pilih secara langsung oleh mereka.
3. Dalam pilkada, kampanye sebagai sarana untuk mendapatkan massa, simpatik dan dukungan ternyata sangat mendapatkan perhatian dari santri, mereka lebih

cenderung suka mengikuti kampanye secara terbuka dengan alasan kampanye ini lebih ramai, dan ini merupakan ajang pesta rakyat, sehingga mereka lebih bebas mengeluarkan segala ekspresi, turun ke jalan dan pawai mengelilingi kota, di samping itu mereka juga langsung bisa mendengarkan program kerja dari para calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

4. Ada beberapa alasan santri dalam memberikan dukungan terhadap para calon di antaranya adalah karena tertarik dengan imbalan yang di tawarkan oleh para tim sukses tertentu, wujud dari imbalan tersebut biasanya berwujud dengan memberikan kaos, rokok, uang bensin dan segala sesuatu yang di butuhkan.
5. Dalam Pilkada ini para santri cenderung memperlihatkan sikap Netral di karenakan tidak adanya calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang mewakili mereka tidak ada warga NU yang mencalonkan atau dengan kata lain Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partainya mereka tidak mencalonkan kadernya untuk mencalonkan sebagai kandidat calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
6. Sesebuah dan pengasuh sebagai pimpinan tertinggi di pondok Pesantren Al Mutaqien juga meperlihatkan sikap Netralnya atau tidak memberikan dukungan terhadap calon tertentu, hal ini di sebabkan karena dari warga NU atau dari partai PKB tidak ada yang mencalonkan diri. sikap yang demikian bisa juga di ikuti oleh para santri sehingga kebanyakan santri memperlihatkan sikap netralnya.

7. Ketertarikan santri dalam memberikan hak suaranya dalam Pilkada ini karena mereka cenderung peduli dengan masa depan daerah, sehingga walaupun mereka di berikan imbalan mereka tetap memilih calon yang dianggap mampu untuk memimpin Daerah.

B. Saran

Adapun saran – saran yang dapat penyusun sampaikan untuk santri dan semua pihak yang terlibat di dalamnya adalah sebagai berikut :

1. Di dalam memutuskan pilihan politik, hendaknya atas pertimbangan secara rasional dan tidak atas pertimbangan untuk sesaat. Karena pilihan dan perilaku politik dalam pilkada ini sangat menentukan masa depan daerah.
2. Santri sebagai generasi bangsa yang berbasis Islami seharusnya bisa mengambil keputusan dengan sebaik baiknya tidak ikut - ikutan dalam menentukan pilihan politikya.
3. Bagi KPUD, sebagai panitia penyelenggara PILKADA hendaknya juga bisa membimbing, dan mengarahkan warga masyarakat agar bisa berpolitik secara baik agar tercipta pemerintahan yang baik demi masa depan daerah. Selain itu KPUD di harapkan secara optimal dapat meningkatkan peranya dalam penyelenggaraan Pilkada berkaitan dengan sosialisasi Pilkada walaupun dengan keterbatasan sarana, dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama 1996.

B. Sumber Lain

Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta LP3ES, 1994.

Gertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1989.

Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer Surabaya*, Arkola, 1994.

Madjid, Nurcholis, *Bilik bilik pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta Paramadina, 1997.

M.D., Mahfud, ' *Demokrasi dan konstitusi di indonesia*'. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Mulkhan, Munir, Abdul, *Runtuhya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan Dalam Islam*, Yogyakarta, Sypress 1994.

M. Qurais, Shihab, *Wawasan Al Quran* Mizan, Bandung, 1996.

Rais,Amin, *Cakrawala Islam, Antara Cita Dan Fakta*, Bandung, Mizan, 1987.

Natsir, Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.

Robert W Hefner. *Civil Islam, Jakarta, ISAI dan The Asia Fondation*, 2001.

Sadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta, UII Pres, 1990.

Singarimbun, Masri & Sofyan, *Metode Penelitian Surfey*, LP3ES, Jakarta,1989.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung Alfabeta,1997.

Suprayogo, Imam dan Tabrani, *Metedologi Peneltian Sosial Agama*, Bandung, Rosda, 2001.

Turner, S, Brian, *Sosiologi Islam*. Jakarta, Rajawali,1992.

Ummatin, Khoiru, *Perilaku Poltik Kiai*, Pustaka Pelajar, Jakarta 2002.

Ziemek, Manfrend, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta : P3M, 1986.

_____, *Undang - Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah*, Media Presindo, Yogyakarta, 2005.

_____, *Undang-Undang Dasar 1945, P-4*, GBHN, *Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

C. Jurnal

Bruinsen, van, Martin, *Pesantren Dan Kitab Kuning, Pemeliharaan Tradisi Pesantren*, Jurnal, Ulumul Quran, 1992.

Anwar, Syafi'i, *Agama, Negara Dan Dinamika Civil Society Di Indonesia*. Jurnal, Al Wasottiyah 2006.

Asfar, Muhamad, *Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai*, 1995.

Ida, Loeda, *Kembali Ke Khittah 1926*, Jurnal Prisma, 1995.

Efendy, Bachtiar, *Islam dan Tata Negara, Transformasi Pemikiran dan Politik Islam*, Jurnal Prisma, 1995.